

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

1. SKPD : **Sekretariat Daerah**
2. TUGAS : Membantu Bupati Dalam Menyusun Kebijakan Dan Mengkoordinasikan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terciptanya masyarakat MTB yang sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dengan baik. • Jumlah Aparatur yang memahami PATEN • Tersedianya Data Base Kecamatan • Terevaluasinya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pemerintahan Umum • Sub Bagian Tata Pemerintahan. • Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Pertanahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan • Dokumen LPPD, ILPPD, LKPJ, LPJ • Laporan Kegiatan Subag 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Hukum Daerah tentang batas wilayah kecamatan dan Desa, Luas Wilayah dan Lainnya • Perda dan Perbup yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan • Jumlah Dusun, Desa & Kecamatan yang dimekarkan • Prosentase penyampian LPPD tepat waktu. • Jumlah Lahan/Tanah Pemda yang tersedia • Prosentase tanah yang telah memiliki patok dan papan nama • Prosentase ketersediaan data rupa bumi dan unsur alami • Jumlah konflik pertanahan yang diatasi dan difasilitasi • Prosentase cakupan ketersediaan data wilayah • Jumlah Produk Hukum Daerah. • Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum • Sub Bagian Rancangan Hukum • Bagian Organisasi • Sub Bagian Akuntabilitas Perangkat Daerah. • Sub Bagian Ketatalaksanaan. • Sub Bagian Kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan • Laporan Kegiatan Subag • Agenda Penomoran Peraturan • Dokumen LAKIPDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Tentang UTJ, Anjab, ABK, SKJ, SOP, SPM, Profile Jabatan, dll. • Terlaksananya Mekanisme kerja oleh SKPD dilihat dengan Pencapaian SPM, IKM, dan pelaksanaan SOP.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah • Prosentase Ketersediaan Dokumen Reformasi Birokrasi di Daerah. • Keberadaan jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD. • Rasio jumlah Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk. • Penegakan Peraturan Daerah. • Tingkat Kemampuan majerial dan kompetensi. • Tingkat penguatan Struktur Kelembagaan Usaha. • Prosentase Pertumbuhan usaha. • Prosentase pendapatan PDRB per kapita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Kelembagaan. • Sub Bagian Kelembagaan. • Bagian Sat Pol PP. • Sub Bagian Trantib • Sub Bagian Penegakan Perda • Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. • Sub Bagian Perekonomian • Sub Bagian Perekonomian. • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat. • Sub Bagian Perekonomian • Sub Bagian Perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan • Dokumen LAKIP • Dokumen Laporan Tahunan • Data BPS 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penyerapan tenaga kerja. • Koordinasi Pengawasan Barang Bereder. • Koordinasi pengawasan harga bahan kebutuhan. • Tingkat distribusi bahan kebutuhan pokok. • Koordinasi Pelayanan perlindungan konsumen. • Prosentase penyebaran tenaga pelayanan dasar Tingkat penyebaran sarana/prasarana pelayanan dasar tingkat peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan akses yang tersedia. • Tingkat Pola Konsumsi pangan Lokal. • Volume diversifikasi komoditi pangan lokal. • Tingkat Ketersediaan sarana/prasarana peningkatan produksi. • Prosentase pengembangan usaha produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perekonomian • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat. • Sub Kesejahteraan Rakyat. • Sub Bagian Perekonomian • Sub Bagian Perekonomian • Sub Bagian Perekonomian 		

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Terselenggaranya pelayanan yang semakin baik untuk internal Organisasi maupun kepada Publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pelayanan Internal Organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Umum: • Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian • Sub Bagian Keuangan • Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. • Bagian Satuan Polisi PP • Bagian Hukum • Bagian Kerjasama dan Investasi • Bagian Pemerintahan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Subag • Daftar Inventaris (KIR, KIB) 	
3.	Terciptanya penataan dan pengembangan kewilayahan otonom.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase cakupan ketersediaan data wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pemerintahan Umum • Sub Bagian Tata Pemerintahan • Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Pertanahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum daerah tentang batas wilayah Kecamatan dan Desa, Luas wilayah dan lain sebagainya

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Terciptanya ketertiban administrasi pertanahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan yang bersertifikat • Kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pemerintahan Umum • Sub Bagian Tata Pemerintahan • Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Pertanahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan Subag • Laporan Penerbitan IMB • Badan Pertanahan Nasional 	
5.	Terwujudnya keadilan dan penegakan hukum yang semakin baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah raperda yang diusulkan • Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan daerah • Waktu rata-rata penyelesaian Raperda • Jumlah pelanggaran perda • Frekuensi sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan • Jumlah peserta sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum • Sub Bagian Rancangan Hukum; • Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum; • Sub Bagian Dokumentasi Hukum. • Bagian Satuan Polisi Pamong Praja • Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban • Sub Bagian Penegakan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan • Laporan Kegiatan Subag • Data kepegawaian 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. 			
6.	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 	<ul style="list-style-type: none"> •Bagian Kerjasama dan Investasi: • Sub Bagian Kerjasama Daerah • Sub Bagian Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Agenda Penomoran Peraturan •Laporan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) •Laporan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang perijinan • Perda tentang pajak dan retribusi daerah
7.	Terwujudnya promosi dan kerjasama investasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah promosi investasi daerah • Jumlah kerjasama investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Bagian Kerjasama dan Investasi: • Sub Bagian Kerjasama Daerah • Sub Bagian Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Laporan Jumlah pameran •Laporan Jumlah promosi •Agenda kerjasama investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Promosi baik tingkat nasional maupun internasional
8.	Tersedianya data jenis kerjasama dan pertumbuhan investasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase cakupan ketersediaan data 	<ul style="list-style-type: none"> •Bagian Kerjasama dan Investasi: • Sub Bagian Kerjasama Daerah • Sub Bagian Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Dokumen jenis kerjasama investasi •Dokumen pertumbuhan investasi •Dokumen perencanaan investasi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
9.	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan investasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pelaksanaan investasi yang dapat dikendalikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kerjasama dan Investasi: • Sub Bagian Kerjasama Daerah • Sub Bagian Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi 	
10.	Tersedianya kebijakan dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat: • Sub Bagian Perekonomian; • Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Peraturan 	
11.	Terlaksananya koordinasi secara rutin dan berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Koordinasi rutin dan berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekda • Asisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda rutin koordinasi internal dan eksternal lingkup pemerintah daerah 	

1. SKPD : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

2. TUGAS: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. FUNGSI :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kinerja sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat Teknis & Sosialisasi • Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional • Meningkatnya disiplin Aparatur • Tersedianya peralatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kepegawaian Setwan • Laporan Evaluasi Kinerja Pegawai • Data Absensi Pegawai • Data Kebutuhan Perlatan Kerja 	
2.	Meningkatnya mekanisme, sistem dan prosedur kerja yang jelas, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) • Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Subag • Laporan Tahunan • Dokumen Keuangan • Agenda Surat 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan (format, struktur, dan waktu) • Ketersediaan Sistem LAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Subag • Laporan Tahunan • Dokumen Keuangan • Agenda Surat 	
4.	Meningkatnya Produk Hukum yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Raperda inisiatif DPRD • Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti • Jumlah Perda usul eksekutif yang disetujui menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Risalah • Sub Bagian Perundang-undangan. • Sub Bagian Persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah Perda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat • Agenda Sidang 	
5.	Meningkatnya kualitas baha rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan protokoler	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana Rapat kerja Komisi, Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD • Terlaksananya Kunjungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol • Sub Bagian Persidangan • Sub Bagian Risalah • Sub Bagian Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Sidang • Laporan Masyarakat 	
6.	Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan kebutuhan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Ketersediaan kebutuhan masing-masing Sub Bagian 	

1. SKPD : **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
 - d. Pembinaan tenaga pendidik;
 - e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
 - f. Penyusunan dan pengembangan kurikulum;
 - g. Pembinaan administrasi sekolah;
 - h. Peningkatan manajemen mutu pendidikan;
 - i. Pelayanan perizinan;
 - j. Pengelolaan UPT;
 - k. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan merata	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ruang kelas dalam kondisi baik • Rasio murid : kelas • Rasio murid : sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pendidikan Tamana Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama • Bidang Pendidikan Menengah • Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana 		
2.	Meningkatkan kuantitas peserta didik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (%) <ul style="list-style-type: none"> • SD • SMP • SMA / SMK • Angka Partisipasi Murni (%) <ul style="list-style-type: none"> • SD • SMP • SMA / SMK • Angka Partisipasi Sekolah (%) • Prosentase angka melek huruf (%) SD, SMP SMA/SMK • Angka rata-rata lama sekolah (%) SD, SMP SMA/SMK • Angka putus sekolah (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Pendidik Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Seksi Bina Pendidik Pendidikan Lanjutan Pertama • Seksi Bina Pendidik Pendidikan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	
3.	Meningkatkan kualitas, Kuantitas, Kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ratio guru : murid <ul style="list-style-type: none"> • SD • SMP • SMA / SMK • Kualifikasi guru berpendidikan S-1 • Guru menurut ijazah tertentu • Prosentase guru menurut bidang study yang diajarkan • Rasio Pengawas : sekolah • Prosentase pengawas berkualifikasi S-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Meningkatkan prestasi akademik siswa agar dapat berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi siswa di bidang akademik • Prosentase kelulusan <ul style="list-style-type: none"> • SD • SMP • SMA / SMK • Prosentase SMK yang melaksanakan PSG • Angka lulusan SMK yang terserap di lapangan kerja • Angka lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Bidang Kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama • Bidang Kurikulum Pendidikan Menengah • Seksi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Seksi Kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama • Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	
5.	Meningkatkan prestasi pemuda di tingkat Regional, Nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi pemuda di tingkat regional, nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	
6.	Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Regional, Nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi pemuda, baik di tingkat regional maupun nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pendidikan Masyarakat; • Seksi Bina Pemuda dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	
7.	Meningkatkan sarana dan jasa penunjang layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan sarana pendukung kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama • Seksi Bina Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Laporan Sekolah Per tahun Pelajaran • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	
8.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat / Bintek / Koordinasi / konsultasi yang diikuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum • Sub Bagian Keuangan • Sub Bagian Perencanaan • Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar • Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama • Bidang Pendidikan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dikpora MTB • Data Pokok Pendidikan Dikpora MTB 	

1. SKPD : **Dinas Kesehatan**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kesehatan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;
 - g. Pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rujukan;
 - i. Pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - j. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - k. Pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan masyarakat;
 - l. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - m. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - n. Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - o. Pelayanan perizinan;
 - p. Pengelolaan upt;
 - q. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Tercapainya Promosi Kesehatan	• Prosentase Jumlah rumah tangga ber PHBS.	• Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	• Laporan dari Puskesmas	
2.	Terwujudnya Lingkungan yang sehat.	• Presentasi akses penduduk terharap air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	• Seksi Penyehatan Lingkungan	• Laporan Tahunan Dinkes MTB • Laporan dari	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penggunaan Jamban Sehat • Prosentase Rumah Sehat 		Puskesmas	
3.	Terwujudnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan KB.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kunjungan Ibu Hamil (K4) • Penanganan Komplikasi Kebidanan yang ditangani • Persalinan di tolong oleh Nakes • Pelayanan Ibu Nifas • Peserta KB Aktif • Kunjungan Neonates Lengkap • Penanganan Komplikasi Neonates • Kunjungan Bayi • Pelayanan Kesehatan Balita • Angka Kematian Ibu /100.000 KH • Angka Kematian Bayi Baru Lahir /1.000 KH 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan PPWS KIA / PKM 	
4.	Meningkatkan status gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Balita Gizi buruk mendapat Perawatan • Penimbangan Bayi D / S • Prosentase Balita 6 – 59 bln mendapat Kapsul Vitamin A • Cakupan Rumah Tangga yang mengkomsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Gizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Rutin Bulanan Gizi Puskesmas • Survei Gizi Puskesmas 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		Garam beryodium • Prosentase Bayi 6 – 59 Bln mendapat Asi Eksklusif			
5.	Peningkatan pelayanan kesehatan LANSIA	• Prosentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia	• Seksi Usia Lanjut	• Laporan Bulanan dari Puskesmas	
6.	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	• Prosentase Daerah UCL	• Seksi Pencegahan Penyakit	• Laporan Bulanan dari Puskesmas	
7.	Peningkatan Pencegahan & Penanggulangan penyakit menular	• Prosentase Penemuan & penanganan penyakit pasien baru TB BTA+. • Prosentase Kesembuhan Pasien TB BTA+ yang di obati • Penyelidikan Epidemiologi KLB <24 Jam	• Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan	• Data Puskesmas T B O1, 05, TB03, 04, 06 dan RS • Laporan dari Puskesmas	
8.	Peningkatan kesehatan siswa SD dan setingkat.	• Prosentase Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya.	• Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan	• Laporan dari Puskesmas	
9.	Peningkatan pelayanan kesehatan Perorangan	• Prosentase rujukan pasien dari pelayanan dasar ke tingkat rujukan (Jamkesda). • Presentase Pelayanan kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	• Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan	• Laporan dari Puskesmas	
10.	Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat Level 1	• Pelayanan Gawat Darurat Level 1 (satu)	• Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan	• Laporan dari Puskesmas	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
11.	Peningkatan jumlah desa siaga aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Desa Siaga Aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	
12.	Peningkatan terbentuknya UKBM	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu Pratama • Posyandu Madya • Posyandu Purnama • Posyandu Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	
13.	Peningkatan pelayanan kesehatan mata/pencegahan kebutaan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pelayanan Mata 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit 	
14.	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pelayanan Sakit Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit 	
15.	Peningkatan Kesehatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader • Prosentase pemeriksaa kesegaran jasmani anak sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	
16.	Peningkatan pelayanan UKG/UKGS	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi di SD/MI 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	
17.	Peningkatan bina kesehatan tradisional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan toga dan pemanfaatannya pada sasaran masyarakat • Peningkatan Pembinaan Pengobat Tradisional yang menggunakan tanaman obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
18.	Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pengendalian dan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas 	
19.	Peningkatan pelayanan kesehatan swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah BP Swasta • Jumlah RS Swasta • Jumlah Dokter Praktek Swasta Perorangan • Jumlah Bidan Praktek Swasta Perorangan • Jumlah Praktek Pengobat Tradisional • Jumlah Apotek 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit 	
20.	Terwujudnya pembangunan masyarakat, individu, keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian • Pendidikan Formal (Dokter Spesialis, S1, D4, dan D3) • Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional • Bimbingan Teknik Pengembangan Manajemen Puskesmas dan RS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Kegiatan Tahunan 	
21.	Peningkatan sarana & dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Puskesmas terhadap penduduk • Rasio Pustu/Poskedes/Polindes Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Bagian Perencanaan 	
22.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi pelayanan kesehatan dasar (jamkesmas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan Puskesmas 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	miskin				
23.	Terwujudnya sistem rujukan dan gawat darurat bagi masyarakat Miskin di RS	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Jamkesda Kabupaten • Prosentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Puskesmas dan Rumah Sakit 	
24.	Pemerataan tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tenaga Kesehatan Penda • Terbentuknya Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 	
25.	Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Teknis Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 	
26.	Peningkatan cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Ketersediaan Obat menurut Kebutuhan • Meningkatkan Pengetahuan tentang Pemanfaatan Obat Tradisional • Meningkatkan Pengetahuan tentang Penggunaan Kosmetik 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Yankesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes dan Puskesmas 	

1. SKPD : **Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan**

2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

- a. Perumusan rancangan kebijakan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. Perumusan rancangan kebijakan umum ketahanan pangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pembinaan dan pengendalian usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan tata guna lahan dan air;
- g. Perlindungan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pembinaan perbibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pembinaan bibit ternak;
- k. Pengelolaan dan penerapan sistem informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- l. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
- n. Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- o. Pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- p. Pelayanan perizinan;
- q. Pengelolaan UPT;
- r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani	• Prosentase pendapatan naik tiap Tahun	• Sub Bagian Perencanaan • Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan (semua bidang)	• Laporan Tahunan	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Terciptanya sistem pertanian yang berorientasi bisnis	• Prosentase Petani siap memasarkan hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil • Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan • Seksi pengendalian hama dan penyakit • Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Data Produksi Pertanian • Neraca Bahan Makanan dan PPH Kabupaten • Laporan Tahunan PPL 	
3.	Kelestarian sumberdaya lokal berupa tanaman pangan hortikultura dan peternakan	Prosentase Produksi meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan (semua bidang); • Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil • Seksi pengendalian hama dan penyakit • Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Publik • Data NBM dan PPH 	
4.	Terciptanya kesempatan bekerja disektor pertanian	Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian.	• Sub Bagian Perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Pengelolaan Lahan dan Air • Laporan Evaluasi Pengelolaan Lahan dan Air 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kebutuhan/keluhan Masyarakat berkurang terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan • Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Harga Pasar 	
6.	Terciptanya pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan	Berkurangnya lahan tidur atau lahan terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Pertanian • Laporan Tahunan 	

1. SKPD : **Dinas Kelautan dan Perikanan**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pengembangan kebaharian masyarakat;
 - e. Pembinaan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - h. Pengamatan, penyelidikan, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - i. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik kelautan dan perikanan;
 - j. Penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. Pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - l. Pengelolaan balai benih ikan;
 - m. Pelayanan perizinan;
 - n. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Tercapainya penguasaan dan penerapan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Produksi Perikanan Tangkap • Prosentase Produksi Perikanan Budidaya • Prosentase pencapaian target PAD 	Bidang Bina Produksi <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perikanan Tangkap • Seksi Benih Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
2.	Terciptanya Kelembagaan usaha yang mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Cakupan Bina Kelompok Usaha Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Bina Usaha • Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Menurunkan angka illegal fishing dan kegiatan yang merusak ekosistem sumberdaya perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pengawasan di laut oleh aparat pengawas perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perikanan Tangkap; • Seksi Benih dan Budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
4.	Tercapainya kapasitas aparat pengawasan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparat pengawas yang memiliki kualifikasi PPNS Pengawas Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pendayagunaan Laut; • Seksi Perlindungan Sumber Daya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
5.	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Hb • Jumlah pulau/kawasan wisata bahari 	Bidang Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

1. SKPD : **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**
2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;
 - e. Pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - f. Pengendalian dan pembinaan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - g. Penatausahaan hasil hutan;
 - h. Pengelolaan kawasan lindung setempat;
 - i. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - j. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - k. Pengelolaan pembenihan dan pembibitan;
 - l. Pelayanan perizinan;
 - m. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kepegawaian 	
2.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani hutan dan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelompok Tani Binaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Menurunnya jumlah penduduk miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan rata-rata petani • Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Lapangan 	
4.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha pada sektor hutan dan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase keterserapan tenaga kerja pada sektor kehutanan dan perkebunan • Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha • Seksi Penatausahaan Hasil Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS dan Dinsosnakertrans • Data Produksi 	
5.	Meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase sumbangan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha • Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil • Seksi Penatausahaan Hasil Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS 	
6.	Menurunnya luasan lahan kritis pertahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • BPKH Ambon 	
7.	Peningkatan perluasan areal perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha • Sub Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • BPTP Promal 	
8.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Laju kerusakan hutan • Prosentase Penurunan Jumlah Perambahan Hutan (<i>Illegal Cutting</i>) • Angka kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perlindungan • Seksi Penatausahaan Hasil Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Kehutanan dan Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Inventarisir Barang 	

1. SKPD : **Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi**
2. TUGAS : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan Tugas pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana perkotaan dan perdesaan;
 - d. pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana perkotaan dan perdesaan;
 - e. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - f. pengelolaan laboratorium, alat-alat berat, dan penerangan jalan umum;
 - g. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan, geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;
 - h. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;
 - i. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;
 - j. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;
 - k. pelayanan perizinan;
 - l. pengelolaan UPT;
 - m. pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur ke-Cipta Karya-an yang bermanfaat dan ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan infrastruktur ke-Cipta Karya-an sebesar 52% • Rasio tempat ibadah per satuan penduduk • Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk • Rasio rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan • Seksi Perumahan dan Permukiman • Seksi Pertamanan dan Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • Hasil Survei BPS 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio permukiman layak huni • Prosentase rumah tinggal bersanitasi • Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi • Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih • Prosentase ketersediaan gedung kantor pemerintah 			
2.	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur teknis bidang ke-PU-an yang profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah SDA yang bersertifikat teknis sebanyak 21 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kepegawaian 	
3.	Terwujudnya kemudahan akses sarana prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas ke semua wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kondisi jalan kabupaten dari 44,49% menjadi 70% di tahun 2017 • Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik • Prosentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum • Prosentase desa yang telah memiliki jalan aspal • Panjang jalan yang terbangun • Panjang jalan yang terehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan • Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan • Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • Hasil Survei 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panjang jembatan yang terbangun • Panjang jembatan yang terehabilitasi 			
4.	Terwujudnya ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan jaringan, instalasi listrik dan sebesar energy baru terbarukan dan konversi energy 56% 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perumahan dan Permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan Seksi • Hasil Survei BPS 	
5.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya mineral secara bijak dan ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lahan pemanfaatan galian golongan C sebesar 25 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Geologi dan Tata Lingkungan • Seksi Pertambangan Umum dan Energi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Realisasi PAD 	
6.	Terwujudnya data base perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang up to date.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan data base sebesar 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan • Sub Bagian Keuangan • Sub Bagian Umum • Bidang Cipta Karya • Bidang Bina Marga • Bidang Pertambangan dan Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akhir Tahun 	Subag. Perencanaan 7 dokumen, Subag Keuangan 1 dokumen, Subag Umum 1 dokumen, Bidang Cipta Karya 12 dokumen, Bidang Bina Marga 12 dokumen, & Bidang Pertambangan dan Energi 2 dokumen

1. SKPD : **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Penyuluhan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan pelayanan sosial;
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan dan pembinaan sosial;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- g. Pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan organisasi/lembaga sosial;
- i. Pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja;
- j. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
- k. Penyelenggaraan transmigrasi;
- l. Pelaksanaan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- m. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data tenaga kerja dan transmigrasi;
- o. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Berkurangnya Angka pengangguran	<ul style="list-style-type: none">• Angka partisipasi angkatan kerja (%)• Tingkat pengangguran terbuka (%)• Tingkat kesempatan kerja (%)• Prosentase pencari kerja lulusan D1 – S3 (%)	<ul style="list-style-type: none">• Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas• Seksi Pengembangan dan Perluasan• Seksi Penyediaan dan Penempatan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Tahunan• MTB Dalam Angka• Laporan Seksi	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio penduduk yang bekerja (%) • Angka beban ketergantungan (%) • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi • Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan 		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang SPM di Bidang Sosial 	
2	Terwujudnya perlakuan yang sama dalam pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengesahan peraturan perusahaan • Jumlah pendaftaran perjanjian kerja bersama • Jumlah sengketa pengusaha-pekerja • Jumlah penyelesaian sengketa kerja di luar pengadilan • Jumlah Kasus Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) • Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (SPM) • Besaran pemeriksaan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja • Seksi Pengawasan dan Perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Agenda Penomoran Peraturan • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Besaran pengujian peralatan di perusahaan • Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 			
3	Meningkatkan usaha ekonomi produktif (UEP) PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi PMKS potensial penerima program UEP • Prosentase kemajuan usaha penerima program UEP • Prosentase KUBE fakir miskin • Prosentase KUBE fakir miskin kategori tumbuh • Prosentase Jumlah KK Fakir Miskin Penerima Program PKH • Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bina Sosial • Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Hasil Survei • Laporan Tahunan 	
4	Melaksanakan perlindungan sosial bagi PMKS terlantar dan tidak potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PMKS tidak potensial dan terlantar yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar • Jumlah Lansia yang menerima bantuan sosial • Jumlah Anak terlantar yang menerima bantuan sosial • Jumlah orang dengan Kecacatan yang menerima bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang SPM di Bidang Sosial 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kabupaten • Penyediaan sarana/wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) untuk pelayanan kesejahteraan sosial • Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap • Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial 			
5	Terwujudnya lokasi transmigrasi lokal dan lokasi transmigrasi umum di daerah tertinggal yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah KK transmigran lokal (Wesawak) • Jumlah KK calon transmigran lokal (Lorulun Barat) • Jumlah KK calon transmigrasi umum (Watitir) • Jumlah lokasi transmigrasi lokal • Jumlah calon lokasi transmigrasi lokal • Jumlah calon lokasi transmigrasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi • Seksi Pendaftaran dan Penempatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	

1. SKPD : **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil dan menengah, serta kemitrausahaan dan koperasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;
- f. pengawasan produk dan pengendalian teknis terhadap industri mikro, kecil dan menengah;
- g. penyediaan informasi teknologi pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah;
- h. penerapan hak atas kekayaan intelektual;
- i. pemberian bimbingan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrolagian, promosi, dan pemasaran;
- j. pelaksanaan monitoring penyediaan dan penyaluran barang;
- k. pelaksanaan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi;
- l. pengesahan badan hukum amalgamasi dan pembubaran koperasi.
- m. pelayanan perizinan;
- n. pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kinerja Aparatur dan pelayanan kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Terselenggaranya operasional kantor selama setahun• Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur• Terciptanya kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kasubag Umum• Kasubag Keuangan• Kasubag Perencanaan• Seksi Kelembagaan• Seksi Usaha Industri• Seksi Sarana Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Kegiatan Seksi• Laporan Tahunan• Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya monitoring dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan • Meningkatnya pelayanan pengesahan akte koperasi (Badan Hukum Koperasi) • Meningkatnya pelayanan perijinan (SIUP,TDP,TDG,TDI dan Hukum Koperasi) • Meningkatnya SDM Aparatur 		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Semesteran 	
2.	Meningkatnya nilai tambah produk untuk dipromosikan pada skala regional maupun Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi industry terhadap PDRB (%) • Jumlah produk unggulan yang mampu menebus pasar regional • Peningkatan Omzet pertahun (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Usaha Industri • Seksi Sarana Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	
3.	<p>a) Meningkatnya Industri Kerajinan rakyat dan Industri Makanan dengan Penggunaan Teknologi Tepat guna</p> <p>b) Tersedianya pelaku pelaku industri yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaku IKM yang Menggunakan IPTEK Dalam Industri (orang) • Jumlah Produk IKM yang Berkualitas • Penambahan Unit Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Usaha Industri • Seksi Sarana Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	
4.	a) Terciptanya kesempatan usaha dan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentaseang UKM yang Memperoleh informasih Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Usaha Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran SIUP dan IUI 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	b) Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan promosi skala lokal, regional maupun nasional 		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	
5.	a) Meningkatkan kelancaran distribusi serta ketersediaan barang b) Terciptanya sistem pemasaran yang mendekatkan pasar ke sentra produksi c) Tersedianya akses informasi pasar yang meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%) • Jumlah sarana dan prasarana perdagangan untuk distribusi • Jumlah ketersediaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat • Jumlah peredaran jenis barang kadarluasa • Jumlah pengawasan barang beredar dan kebutuhan pokok • Jumlah Pemasaran melalui kegiatan promosi dan pameran 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Usaha Industri • Seksi Sarana Perdagangan • Seksi Kemitraan dan Permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • Laporan Semester 	
6.	a) Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang berkualitas b) Meningkatkan kualitas SDM koperasi UMKM c) Tersedianya koperasi yang di	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah koperasi yang berkualitas • Prosentase koperasi aktif • Jumlah pertumbuhan UMKM • Prosentase jumlah SDM koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Sarana Perdagangan • Seksi Perlindungan Konsumen • Seksi Kemitraan dan Permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana (KIR/KIB) • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	jadikan sebagai lembaga koperasi dan perbankan d) Tercipnya wira usaha ibu rumah tangga dan generasi muda yang berdaya saing				

1. SKPD : **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pos, telekomunikasi, informatika, peliputan, dan media serta pelayanan informasi;
 - d. Penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informasi;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sistem informasi;
 - f. Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data;
 - g. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;
 - h. Pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan, dan perparkiran;
 - i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;
 - j. Pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
 - k. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;
 - l. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
 - m. Pengujian kendaraan bermotor;
 - n. Pelayanan perizinan;
 - o. Pengelolaan UPT;
 - p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan perluasan akses sarana perhubungan komunikasi dan informatika sampai ke pelosok daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Terminal, Pelabuhan dan Bandara • Jumlah Jaringan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Prasarana dan Sarana (Bidang Laut, Udara); • Seksi Prasarana dan Sarana (Bidang Darat); • Seksi Telekomunikasi dan Informatika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Sarana perhubungan komunikasi dan informatika. 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan fasilitas serta pelayanan jasa perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Angkutan Darat yang terdaftar • Jumlah Angkutan Laut yang terdaftar • Jumlah Angkutan Udara yang terdaftar • Jumlah Arus Penumpang/Barang Angkutan Umum (Darat, Laut, Udara) • Rasio Ijin Trayek • Jumlah Uji Kir Angkutan Umum • Rasio Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU), Halte • Jumlah SDMA bidang perhubungan yang mengikuti diklat • Jumlah bongkar muat barang dan penumpang • Rasio Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Seksi Kecuali Bidang Kominfo; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Base bidang Perhubungan 	
3.	Terciptanya e-government dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah • Jumlah Sistem Infomasi Pemerintah Daerah • Jumlah SDMA bidang Kominfo yang mengikuti diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Telekomunikasi dan Informatika; • Seksi Media dan Peliputan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base bidang Kominfo 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Terwujudnya akses dan respon masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Jaringan Komunikasi • Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk • Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal • Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal • Rasio Penduduk yang menggunakan HP/Telepon • Rasio Peran Masyarakat dalam pembangunan (Jumlah Pengaduan Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Telekomunikasi dan Informatika; • Seksi Media dan Peliputan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base bidang Kominfo 	

1. SKPD : **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan Dan Kepariwisata Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
 - e. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
 - f. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;
 - g. Perlindungan benda-benda cagar budaya;
 - h. Pelayanan perizinan;
 - i. Pengelolaan UPT;
 - j. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya pergerakan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kegiatan Kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata • Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seksi 	
2.	Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Destinasi Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Nilai-nilai Budaya; • Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akhir Tahun • Laporan Inventarisasi Barang Pariwisata 	
3.	Meningkatnya Obyek dan Daya Tarik Wisata yang representatif dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ODTW 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata • Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) • Laporan Seksi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap pengelolaan Kekayaan nilai-nilai budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat/kelompok yang dibina 	- Seksi Bina Usaha Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) Laporan Seksi 	
5.	Peningkatan pengelolaan aset pariwisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> % Pengelolaan aset pariwisata & Ekonomi kreatif 	- Seksi Bina Usaha Wisata;	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) Laporan Seksi 	
6.	Tercapainya peningkatan peran dan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian nilai-nilai seni budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Keterlibatan Masyarakat/kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Nilai-nilai Budaya; Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) Laporan Seksi Data Base Kelompok Jasa Usaha 	
7.	Terwujudnya kualitas aparatur di sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat 	- Sub Bagian Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Data Base Kepegawaian 	

1. SKPD : **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. Pelayanan akta catatan sipil;
 - f. Pengelolaan pendapatan;
 - g. Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Pengelolaan UPT;
 - j. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang cepat, tepat, akurat dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil • Prosentase ketersediaan prasarana dan sarana operasional SIAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pendataan, Dokumentasi dan Informasi • Seksi Pendaftaran Penduduk • Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak • Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak dan Pengesahan Anak • Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Laporan ketersediaan Sarana dan prasarana 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pendataan, Dokumentasi dan Informasi • Seksi Pendaftaran Penduduk • Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak • Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak dan Pengesahan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil Pendataan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil • Data Pelayanan Masyarakat terhadap Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil 	
3.	Mewujudkan kualitas penyajian data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara menyeluruh yang dapat diakses oleh kalangan internal maupun eksternal dengan mudah, cepat dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketesediaan data base kependudukan dan catatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pendataan, Dokumentasi dan Informasi • Seksi Pendaftaran Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisitem Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 	

1. SKPD : **Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan umum pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - c. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan;
 - d. Perumusan kebijakan penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pembinaan pendapatan;
 - f. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - j. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
 - k. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
 - l. Pembinaan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi;
 - m. Penyusunan laporan keuangan daerah;
 - n. Pengelolaan UPT;
 - o. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah, baik sumber maupun penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ▪ Prosentase peningkatan sumber pendapatan daerah ▪ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis peningkatan pendapatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penerimaan • Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Seksi Dana Perimbangan • Seksi Kas Daerah (Kasda) 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra • RPJMD • Laporan tahunan • Laporan Proyeksi • Pendapatan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pesentase Pemahaman wajib pajak. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi Dana Perimbangan dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI ▪ Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Dana Perimbangan 		
2.	Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan APBD ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum berupa Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum sebagai dasar pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ▪ Tertanggungjawabnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya ▪ Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran • Seksi Anggaran Pendapatan • Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan • Bidang Penatausahaan Keuangan • Seksi Perbendaharaan • Seksi Perencanaan Kebutuhan • Seksi Anggaran Belanja • Bidang Aset • Seksi Inventarisasi dan Penghapusan • Seksi Pencatatan dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD dan Perda APBD Perubahan • Laporan LKPJ • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD ▪ Prosentase tertatanya barang milik daerah ▪ Berkurangnya kesalahan penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD ▪ Tersedianya data sebagai bahan rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan ▪ Tersusunnya kebutuhan dengan baik ▪ Terciptanya administrasi aset dengan baik ▪ Frekwensi pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan Unit Pengguna Barang Daerah terarah ▪ Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ▪ Terlaksananya Penghapusan dan Penjualan barang milik daerah ▪ Tersedinya buku laporan BMD 			
3.	Terwujudnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota ▪ Tersedianya Data sebagai Laporan hasil evaluasi ▪ Tersedianya Data monitoring Evaluasi dan Laporan Bantuan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Penatausahaan ▪ Bidang Anggaran ▪ Seksi Perencanaan Kebutuhan ▪ Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ▪ Seksi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertibnya administrasi asset daerah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Tersedianya pengurus barang SKPD yang berkompeten dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa. ▪ Tersedianya Produk Hukum tentang APBD Desa 			
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah, baik sumber maupun penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ▪ Prosentase peningkatan sumber pendapatan daerah ▪ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis peningkatan pendapatan. ▪ Meningkatnya pesentase Pemahaman wajib pajak. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi Dana Perimbangan dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI ▪ Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penerimaan • Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Seksi Dana Perimbangan • Seksi Kas Daerah (Kasda) • Seksi Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra • RPJMD • Laporan tahunan • Laporan Proyeksi • Pendapatan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan APBD ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum berupa Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum sebagai dasar pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ▪ Tertanggungjawabnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya ▪ Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD ▪ Prosentase tertatanya barang milik daerah ▪ Berkurangnya kesalahan penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD ▪ Tersedianya data sebagai bahan rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran • Seksi Anggaran Pendapatan • Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan • Bidang Penatausahaan Keuangan • Seksi Perbendaharaan • Seksi Perencanaan Kebutuhan • Seksi Anggaran Belanja • Bidang Aset • Seksi Inventarisasi dan Penghapusan • Seksi Pencatatan dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD dan Perda APBD Perubahan • Laporan LKPJ • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunya kebutuhan dengan baik ▪ Terciptanya administrasi aset dengan baik ▪ Frekwensi pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan Unit Pengguna Barang Daerah terarah ▪ Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ▪ Terlaksananya Penghapusan dan Penjualan barang milik daerah ▪ Tersedianya buku laporan BMD 			
3.	Terwujudnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota ▪ Tersedianya Data sebagai Laporan hasil evaluasi ▪ Tersedianya Data monitoring Evaluasi dan Laporan Bantuan Pemerintah Daerah ▪ Tertibnya administrasi asset daerah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Tersedianya pengurus barang SKPD yang berkompeten dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa. ▪ Tersedianya Produk Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Penatausahaan ▪ Bidang Anggaran ▪ Seksi Perencanaan Kebutuhan ▪ Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ▪ Seksi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah, baik sumber maupun penggunaannya.	<p>tentang APBD Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ▪ Prosentase peningkatan sumber pendapatan daerah ▪ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis peningkatan pendapatan. ▪ Meningkatnya pesentase Pemahaman wajib pajak. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi Dana Perimbangan dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI ▪ Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penerimaan • Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Seksi Dana Perimbangan • Seksi Kas Daerah (Kasda) • Seksi Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra • RPJMD • Laporan tahunan • Laporan Proyeksi • Pendapatan 	
2.	Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan APBD ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum berupa Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran • Seksi Anggaran Pendapatan • Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan • Bidang Penatausahaan Keuangan • Seksi Perbendaharaan • Seksi Perencanaan Kebutuhan • Seksi Anggaran Belanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD dan Perda APBD Perubahan • Laporan LKPJ • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Produk Hukum sebagai dasar pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ▪ Tertanggungjawabnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya ▪ Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD ▪ Prosentase tertatanya barang milik daerah ▪ Berkurangnya kesalahan penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD ▪ Tersedianya data sebagai bahan rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan ▪ Tersusunnya kebutuhan dengan baik ▪ Terciptanya administrasi aset dengan baik ▪ Frekwensi pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan Unit Pengguna Barang Daerah terarah ▪ Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Aset • Seksi Inventarisasi dan Penghapusan • Seksi Pencatatan dan Pelaporan 		

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Penghapusan dan Penjualan barang milik daerah ▪ Tersedianya buku laporan BMD 			
3.	Terwujudnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota ▪ Tersedianya Data sebagai Laporan hasil evaluasi ▪ Tersedianya Data monitoring Evaluasi dan Laporan Bantuan Pemerintah Daerah ▪ Tertibnya administrasi asset daerah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Tersedianya pengurus barang SKPD yang berkompeten dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa. ▪ Tersedianya Produk Hukum tentang APBD Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Penatausahaan ▪ Bidang Anggaran ▪ Seksi Perencanaan Kebutuhan ▪ Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ▪ Seksi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah, baik sumber maupun penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ▪ Prosentase peningkatan sumber pendapatan daerah ▪ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis peningkatan pendapatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penerimaan • Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Seksi Dana Perimbangan • Seksi Kas Daerah (Kasda) 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra • RPJMD • Laporan tahunan • Laporan Proyeksi • Pendapatan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pesentase Pemahaman wajib pajak. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi Dana Perimbangan dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI ▪ Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Dana Perimbangan 		
2.	Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan APBD ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum berupa Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum sebagai dasar pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ▪ Tertanggungjawabnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya ▪ Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran • Seksi Anggaran Pendapatan • Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan • Bidang Penatausahaan Keuangan • Seksi Perbendaharaan • Seksi Perencanaan Kebutuhan • Seksi Anggaran Belanja • Bidang Aset • Seksi Inventarisasi dan Penghapusan • Seksi Pencatatan dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD dan Perda APBD Perubahan • Laporan LKPJ • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD ▪ Prosentase tertatanya barang milik daerah ▪ Berkurangnya kesalahan penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD ▪ Tersedianya data sebagai bahan rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan ▪ Tersusunnya kebutuhan dengan baik ▪ Terciptanya administrasi aset dengan baik ▪ Frekwensi pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan Unit Pengguna Barang Daerah terarah ▪ Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ▪ Terlaksananya Penghapusan dan Penjualan barang milik daerah ▪ Tersedianya buku laporan BMD 			
3.	Terwujudnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota ▪ Tersedianya Data sebagai Laporan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Penatausahaan ▪ Bidang Anggaran ▪ Seksi Perencanaan Kebutuhan ▪ Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Data monitoring Evaluasi dan Laporan Bantuan Pemerintah Daerah ▪ Tertibnya administrasi asset daerah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Tersedianya pengurus barang SKPD yang berkompeten dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa. ▪ Tersedianya Produk Hukum tentang APBD Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Monitoring dan Evaluasi 		
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah sesuai SAK pemerintah, baik sumber maupun penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ▪ Prosentase peningkatan sumber pendapatan daerah ▪ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis peningkatan pendapatan. ▪ Meningkatnya pesentase Pemahaman wajib pajak. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan. ▪ Frekwensi Rekonsiliasi Dana Perimbangan dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penerimaan • Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Seksi Dana Perimbangan • Seksi Kas Daerah (Kasda) • Seksi Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra • RPJMD • Laporan tahunan • Laporan Proyeksi • Pendapatan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah. 			
2.	Terwujudnya penataan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan APBD ▪ Tersedianya produk hukum sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum berupa Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD ▪ Tersedianya Produk Hukum sebagai dasar pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ▪ Tertanggungjawabnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya ▪ Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD ▪ Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD ▪ Prosentase tertatanya barang milik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran • Seksi Anggaran Pendapatan • Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan • Bidang Penatausahaan Keuangan • Seksi Perbendaharaan • Seksi Perencanaan Kebutuhan • Seksi Anggaran Belanja • Bidang Aset • Seksi Inventarisasi dan Penghapusan • Seksi Pencatatan dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD dan Perda APBD Perubahan • Laporan LKPJ • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya kesalahan penatausahaan keuangan daerah di setiap SKPD ▪ Tersedianya data sebagai bahan rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan ▪ Tersusunnya kebutuhan dengan baik ▪ Terciptanya administrasi aset dengan baik ▪ Frekwensi pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan Unit Pengguna Barang Daerah terarah ▪ Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ▪ Terlaksananya Penghapusan dan Penjualan barang milik daerah ▪ Tersedinya buku laporan BMD 			
3.	Terwujudnya penataan administrasi keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota ▪ Tersedianya Data sebagai Laporan hasil evaluasi ▪ Tersedianya Data monitoring Evaluasi dan Laporan Bantuan Pemerintah Daerah ▪ Tertibnya administrasi asset daerah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Penatausahaan ▪ Bidang Anggaran ▪ Seksi Perencanaan Kebutuhan ▪ Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ▪ Seksi Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya pengurus barang SKPD yang berkompeten dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah ▪ Rasio Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa. ▪ Tersedianya Produk Hukum tentang APBD Desa 			

1. SKPD : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;
 - d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;
 - e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - f. Penyusunan program pembangunan daerah;
 - g. Penyusunan rencana strategis daerah;
 - h. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
 - i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
 - j. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;
 - k. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - m. Pengelolaan upt;
 - n. Pengelolaan ketatausahaan badan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Tercapainya kinerja dan kesejahteraan aparatur	Prosentase ketepatan waktu dalam penyelesaian kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial • Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan • Sub Bidang Industri dan Jasa • Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • Agenda Penomoran Surat Penyampaian Dokumen Perencanaan • Laporan Telaahan Kajian Program 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Prasarana dan Tata Ruang • Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup • Sub Bagian Perencanaan. 		
2.	Tercapainya kualitas sumber daya aparatur perencana yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah apartur yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Telaahan Kajian Program • Laporan Tahunan 	
3.	Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan • Semua Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Koordinasi • Laporan Telaahan Kajian Program • Laporan Monitoring dan Evaluasi • Laporan Tahunan 	
4.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	Prosentase perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang			
5.	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase dokumen perencanaan yang dihasilkan • Prosentase kesesuaian hasil perencanaan dengan kebutuhan • Prosentase rencana pembangunan dengan hasil pelaksanaan rencana 			

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang responsif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase hasil perencanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel 			
7.	Terwujudnya data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan data dan informasi terhadap dokumen perencanaan yang dihasilkan 			

1. SKPD : **Inspektorat Daerah**

2. TUGAS : Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah.

3. FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- c. Pemeriksaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;
- e. Pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- f. Penyampaian saran tindakan preventif dan atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Pengelolaan ketatausahaan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksanannya pengawasan disetiap unit kerja• Temuan yang ditindak Lanjuti• Jumlah pengaduan yang diperiksa• Terukurnya Capaian kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none">• Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan• Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian• Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Laopran SKPD• Laopran MONEV• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), PKPT, Pemsus• Laporan Evaluasi LAKIP SKPD	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Terlaksanannya pelaporan yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunya pelaporan yang akurat dan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan • Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian • Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), PKPT, Pemsus 	
3.	Meningkatnya kemampuan teknis aparat pengawasan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan tenaga fungsional auditor sesuai dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kepegawaian 	
4.	Meningkatnya sarana dan prasaranan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • KIR/KIB pada Bendahara Barang 	

1. SKPD : **Badan Kepegawaian Daerah**
2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - c. Pembinaan kepegawaian;
 - d. Pengembangan pegawai;
 - e. Penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
 - f. Penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
 - g. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - h. Pengeloan UPT;
 - i. Pengelolaan ketatausahaan badan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terpenuhinya kebutuhan Data PNS secara akurat dan komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data base Pegawai secara akurat dan komprehensif • Jumlah PNS Kabupaten Kab. MTB • Rasio PNS Kab. MTB 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base PNS 	
2.	Terciptanya pola rekrutmen PNS yang akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya formasi PNS sesuai kebutuhan • Terciptanya Proses pengadaan PNS yang Akuntabel dan Reliabel • Jumlah PNS yang diangkat sesuai Formasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Formasi dan Hasil Analisis Kebutuhan PNS 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Terpenuhinya kompetensi PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase CPNSD mengikuti Diklat Prajabatan • Prosentase Pejabat Struktural Eselon II, III, IV yang mengikuti Diklat Struktural • Pejabat yang telah memenuhi Persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan • Prosentase PNS mengikuti Pendidikan Formal dan Diklat Fungsional sesuai Tugas dan Fungsi Jabatan • Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Formal • Jumlah Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas • Ketepatan Waktu penyelesaian Pendidikan dan Pertanggungjawaban keuangan • Prosentase Mahasiswa Umum yang mendapatkan bantuan pendidikan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data PNS yang Mengikuti Diklat • Data Base PNS 	Diklat prajabatan, Diklatpim, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Terciptanya proses administrasi kepegawaian PNS secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase PNS yang memiliki syarat kenaikan Pangkat dan Berkala diproses secara lancar dan tepat waktu • Jumlah Pegawai yang diberikan bantuan biaya Mutasi • Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan • Ketepatan waktu pengurusan Pangkat • Ketepatan waktu pengurusan Pensiun sesuai Peraturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Mutasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Register KP PNS • Data BUP PNS 	Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, dan pensiun
5.	Terisinya struktur organisasi perangkat daerah secara komprehensif dengan memperhatikan kompetensi PNS dan beban kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase jabatan struktural yang terisi • Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD • Prosentase Jafung yang terisi • Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perencanaan dan Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jabatan Struktural; dan Fungsional 	
6.	Adanya pemberian penghargaan kepada PNS secara obyektif berdasarkan prestasi yang diperoleh.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase PNS yang mendapat Penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Kajian dan Seleksi PNS 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
7.	Terciptanya sistem penegakan disiplin PNS secara obyektif dan bertahap.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase PNS yang mendapatkan Sanksi Disiplin/Phunishment sesuai tingkat kesalahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan Pelanggaran Disiplin PNS dan Pegawai Honorer • Presensi masing-masing SKPD 	
8.	Terciptanya kondisi sarana dan prasarana kerja yang baik dan terawat.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Inventaris Ruangan (KIR) • Kartu Inventaris Barang (KIB) 	
9.	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
10.	Penyusunan laporan yang rasional dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Laporan tersampaikan dengan baik dan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Capaian Kinerja • Laporan Keuangan Semester • Laporan Akhir Tahun 	

1. SKPD : **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

3. FUNGSI:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Penyuluhan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;
- f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- i. Peningkatan prasarana dan sarana desa/kelurahan;
- j. Peningkatan perekonomian desa/kelurahan;
- k. Pengembangan potensi dan sumber daya desa/kelurahan;
- l. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat;
- m. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;
- n. Pelaksanaan peningkatan keluarga sejahtera;
- o. Pengelolaan UPT;
- p. Pengelolaan ketatausahaan badan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Sub Bagian Umum• Sub Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Tahunan• Laporan Subag	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai 			
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan Aparatur dalam pendidikan Formal • Keikutsertaan Aparatur dalam Pendidikan Informal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum • Sub Bagain Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subag 	
3	Terwujudnya Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Alat Kontrol Kehadiran Pegawai • Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Umum • Sub Bidang Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
4	Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Dokumen Perencanaan • Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
5	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
6	Terwujudnya peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya Penanggulangan Kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
7	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan • Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Kelembagaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
8	Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
9	Terwujudnya optimalisasi pengetahuan dan pemanfaatan potensi SDA lokal oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Perekonomian Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
10	Terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Aktif • Tersedianya Dokumen Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintaha Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Perekonomian Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
11	Terwujudnya manajemen pemerintahan desa yang aktif menuju kemandirian /	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Tata Kelola Manajemen Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Perekonomian Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	otonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Tersedianya Data Profil Desa sesuai Permendagri 12 Tahun 2007 			
12	Terwujudnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Demokratis dan Peningkatan dusun menjadi desa dalam pelaksanaan otonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sumber Daya Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkualitas dalam memimpin Desa • Terwujudnya Peningkatan Status Dusun menjadi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Perekonomian Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
13	Terwujudnya peningkatan perlindungan bagi perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan perlindungan perempuan/ibu dan anak dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
14	Terwujudnya Peningkatan pengembangan kelembagaan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkoordinasinya kelembagaan dan kegiatan Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	jaringan PUG diberbagai bidang pembangunan	Perempuan dan Anak			
15	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya percepatan pengurangan KDRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
16	Meningkatkan Kesejahteraan anak dan mewujudkan anak MTB yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan daerah yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	
17	Menurunkan tingkat penambahan penduduk melalui pelayanan KB yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Tingkat Pertumbuhan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Institusi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
18	Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sikap perilaku positif remaja tentang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Peningkatan Peran dan Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Subbid 	

1. SKPD : **Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.

3. FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. Penanggulangan terhadap ancaman dan atau bencana;
- f. Peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. Pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- h. Pengelolaan ketatausahaan kantor.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya kesadaran berpolitik masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase masyarakat yang menggunakan hak pilih • Jumlah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seksi • KPUD • Penyelenggara Pemilihan 	Termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa
2.	Terwujudnya kesatuan bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase konflik sosial dalam masyarakat • Prosentase konflik sosial dalam masyarakat yang berhasil ditangani/diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Kesatuan Bangsa • Seksi Hubungan Antar Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seksi • Aparat terkait (Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan pihak berwajib) 	Termasuk tingkat partisipasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat
3.	Terwujudnya kehidupan yang aman dan tertib.	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kriminalitas yang tertangani • Prosentase penyelesaian pelanggaran hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perlindungan Masyarakat • Seksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seksi • Aparat terkait (Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan 	Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak anggota linmas, polsek, kepala

		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang tertangani • Prosentase jumlah anggota satuan linmas • Prosentase pembangunan pos ronda 	Hubungan Antar Lembaga	pihak berwajib: Kepolisian, Kejari dan Pengadilan Negeri)	desa, kejar dan pengadilan.
4.	Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam menangani bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya kelompok masyarakat tanggap bencana • Prosentase daerah-daerah berpotensi bencana • Prosentase kebakaran hut, kerusakan lingkungan dan ilegal logging, ilegal oil 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Perlindungan Masyarakat • Seksi hubungan antar lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seksi • Satuan Linmas • Aparat terkait (Dinas perhubungan, Kehutanan, KPDL, Bencana Alam, Perikanan) 	Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak anggota linmas, Dinas Perhubungan, Kehutanan, KPDL, Kepala Desa, Dinas Perikanan.

1. SKPD : **Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan**
2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. Pencegahan dampak lingkungan;
 - f. Pengelolaan kebersihan dan pemakaman;
 - g. Penanggulangan bahaya kebakaran;
 - h. Pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
 - j. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - k. Pengelolaan ketatausahaan kantor.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Tersedianya instrumen dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen konsep, naskah akademis, pedoman terkait pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tumpung lingkungan • Kuantitas peraturan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. • Kuantitas peraturan daerah terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam ketentuan perijinan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL, SPPL. • Jumlah lokasi pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
3.	Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lokasi pemulihan dan pemantauan .kualitas lingkungan • Prosentase Pencegahan Pencemaran air • Prosentase Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak • Banyaknya upaya pemulihan dan pemantauan kualitas lingkungan • Jumlah sarana dan prasarana pengukuran kualitas lingkungan : • Jumlah sarana dan prasaran pengelolaan limbah. • Jumlah anakan pada Perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi • Jumlah lokasi penataan RTH • Prosentase penanganan sampah • Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana dan prasana pemakaman dan tempat pemakaman • Jumlah sarana dan prasarana kebakaran 			
4.	Meningkatnya system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta keterlibatan masyarakat maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa • Jumlah lokasi untuk kegiatan sosialisasi lingkungan bagi masyarakat • Prosentase pelaksanaan ADIWIYATA • Prosentase system dan data informasi SDA dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
5.	Meningkatnya kualitas pengetahuan dan teknis sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparat dalam mengikuti diklat teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
6.	Tercapainya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penegakan hukum lingkungan • Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
7.	Terselenggaranya menagemen kerja dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayan rekomendasi lingkungan • Prosentase cakupan pelayanan perizinan • Prosentase pertanggung jawaban keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

1. SKPD : **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**
2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan.
3. FUNGSI :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. Penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, dan arsip daerah;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terciptanya peningkatan jasa layanan pustaka dan arsip serta kelestarian bahan pustaka dan arsip	Terwujudnya pelayanan prima dan kelestarian bahan pustaka dan arsip	• Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Jumlah Pengunjung • Dokumen Arsip 	
2.	Terbentuknya masyarakat yang gemar membaca	Terwujudnya budaya baca	• Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Daftar pengunjung perpustakaan Daerah/ Bulan • Daftar pengunjung perpustakaan Keliling/ Bulan 	
3.	Terbinanya aparatur pengelola perpustakaan dan kearsipan	Terwujudnya aparatur pengelola yang berkualitas	• Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Kualifikasi Aparatur yang tidak sesuai dengan bidang 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				yang ditangani	
4.	Terciptanya layanan perpustakaan keliling di sekolah dan masyarakat	Terwujudnya pelayanan perpustakaan keliling di seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Masyarakat di Kecamatan yang umumnya masih jauh dari sumber-sumber informasi 	

1. SKPD : **Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah**

2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Dan Non Pemerintah.

3. FUNGSI :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasfilitasi kerjasama;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi kerjasama;
- c. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah;
- d. fasilitasi promosi dan investasi;
- e. pengelolaan ketatausahaan kantor.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya kerjasama daerah melalui kerjasama antar Pemda dan Lembaga non Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kerjasama dengan Pemda dan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan • Agenda Penomoran <i>Memorandum of Understanding/MoU</i> (Naskah Kesepakatan Kerjasama) 	
2.	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan SKPD, LSM dan pelaku Eonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi koordinasi dan konsultasi • Tindak lanjut hasil koordinasi dan konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga • Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda koordinasi • Notulensi Rapat • Laporan Kegiatan Seksi • Laporan Tahunan 	
3.	Terbukanya jaringan pemasaran terhadap hasil-hasil produk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peluang pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga • Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi • Data Pengiriman Hasil Produksi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Promosi hasil-hasil produk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi keikutsertaan dalam ajang promosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga • Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi 	
5.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang harga barang	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi penyampaian informasi harga 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga • Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Seksi 	
6.	Pengendalian harga pokok kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah input kebijakan yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Hubungan Antar Lembaga • Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penomoran Nota Dinas/ Peraturan 	

1. SKPD : **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**
2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan program dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai Rencana Strategis Daerah / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - c. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Pembinaan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - g. Pelaksana tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya Kelembagaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana kerja yang cukup	<ul style="list-style-type: none"> • terpenuhi Tenaga penyuluh sesuai kebutuhan yaitu sejumlah 76 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kelembagaan Tani • Sub Bidang Ketenagaakerjaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan • Sub Bidang Penyuluhan Pertanian • Sub Bidang Perikanan • Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data base Penyuluh 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2.	Penyuluh yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyuluh mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Penyuluhan Pertanian • Sub Bidang Kelautan dan Perikanan • Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sub Bidang 	
3.	Terselenggaranya hubungan kerja yang harmonis antar lembaga terkait di dalam pelaksanaan fungsi penyuluhan dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Rapat koordinasi rutin bersama lembaga terkait dalam kurung waktu 6 (enam) kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen Rapat Koordinasi • Laporan Sub Bagian Perencanaan 	
4.	Terwujudnya petani yang mempunyai kemampuan mengelola usaha taninya baik teknik produksi maupun pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Kemampuan Usaha Tani • Presentasi Kemampuan Usaha Produksi Petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Distribusi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Usaha Produksi Petani 	
5.	Tersedianya cadangan pangan yang dapat menjamin kebutuhan pangan sepanjang waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia 30 unit lumbung pangan tersebar di desa-desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base lumbung-lumbung pangan • Laporan Tahunan 	
6.	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang gizi dan aneka ragam sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral	<ul style="list-style-type: none"> • % masyarakat kurang gizi • Jumlah Kasus masyarakat kurang gizi yang tertangani • Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kewaspadaan dan keanekaragaman • Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Masyarakat • Laporan Sub Bidang • Laporan Tahunan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
7.	Peningkatan produksi bahan pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi Ketahanan produksi bahan pangan lokal meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Kewaspadaan dan keanekaragaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Produksi ketahanan Pangan 	
8.	Peningkatan ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan • Sub Bidang Kewaspadaan dan Keanekaragaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan • Laporan masyarakat 	

1. SKPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

2. TUGAS : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3. FUNGSI :

- a. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
- c. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
- e. penyiapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- f. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk darurat bencana;
- g. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan SDM aparatur dan masyarakat di daerah	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase SDM Aparatur di bidang teknis kebencanaan yang Tangkas, Tangguh dan Tanggap akan Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Seksi Kebersihan dan Pemakaman	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Tahunan• Laporan Seksi	
2.	Terwujudnya system penanganan tanggap darurat yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang serta peningkatan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">• Sarana dan Prasarana penunjang tanggap darurat• Dukungan Logistik saat Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none">• Seksi Kebersihan dan Pemakaman	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Tahunan• Laporan Seksi	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Terwujudnya sistem upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas perencanaan yang handal serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan ke depan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perencanaan • Pengurangan resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Bencana Kebakaran; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

1. SKPD : **Badan Pengelola Perbatasan**

2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

3. FUNGSI :

- l. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- m. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- n. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
- o. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pembangunan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan;
- p. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan;
- q. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- r. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan melalui optimalisasi potensi pengembangan usaha masyarakat, dan pengembangan produksi pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan potensi unggulan daerah, baik ketersediaan bahan baku maupun produktivitas produk-produk turunannya; • Meningkatkan koperasi dan UMKM pengelola potensi unggulan; • Meningkatkan ketersediaan sapsras utama dan penunjang pengelolaan potensi kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid. Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan • Kasie. Pengelolaan Potensi Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 • Rencana Induk Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) • Dokumen Badan Nasional Pengelola Perbatasan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	potensi kawasan perbatasan laut dan darat			Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 • Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB 2012-2017	(BNPP)
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar meliputi kesehatan, pendidikan, pemerintahan, jalan/jembatan, listrik sarana telekomunikasi dan informasi, serta pelayanan transportasi baik darat, laut dan udara secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras transportasi darat, laut dan udara secara terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid. Kerjasama dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan • Kasie. Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 	• Idem	• Idem

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Meningkatnya ketepatan dan kualitas Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mulai dari penyusunan sampai dengan monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; • Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana Aksi baik dari K/L maupun SKPD setiap tahunnya; • Meningkatnya frekuensi KISS tingkat SKPD, Kabupaten, Provinsi dan K/L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Idem 	<ul style="list-style-type: none"> • Idem
4.	Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengelola Perbatasan dan kesadaran masyarakat tentang pengelola kawasan perbatasan laut	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya aparatur Badan Pengelola Perbatasan yang berkualitas dan profesional sebagai penegak garda terdepan NKRI; • Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan perbatasan laut kepada masyarakat nelayan; • Tersedianya sarpras dan peralatan navigasi batas laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Umum dan Kepegawaian • Kabid. Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan • Kasie. Pengelolaan Batas Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Idem 	<ul style="list-style-type: none"> • Idem

1. SKPD : **Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**
2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
3. FUNGSI :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental dan rohani;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara Barat
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan ketersediaan sarana prasarana administrasi perkantoran sesuai kebutuhan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Umum dan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
2.	Meningkatnya Aparatur / Anggota Korps yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penanganan pembinaan Anggota KORPRI • Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Seni, Budaya, Mental Dan Rohani 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pembinaan 	
3.	Terwujudnya hubungan kerjasama antar kelembagaan unit korpri baik secara horisontal maupun vertikal di Kab. MTB	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya forum kelembagaan legislatif organisasi / MUSDA Anggota Korpri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Seni, Budaya, Mental Dan Rohani 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil MUSDA 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum Dan Sosial 		
4.	<p>Terpenuhinya sarana prasarana yang dapat menunjang kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan anggota Korps .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Koperasi PNS. • Tersedianya Mobil / Bus Pegawai. • Jumlah PNS yang menerima bantuan Sosial dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suba Bagian Umum dan Kepegawaian • Sub Bagian Seni, Budaya, Mental Dan Rohani • Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum Dan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan 	
5.	<p>Meningkatkan bakat dan minat anggota KORPRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi peningkatan bakat dan minat anggota KORPRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Seni, Budaya, Mental Dan Rohani 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Data Anggota KORPRI 	

1. SKPD : **Rumah Sakit Umum Daerah**
2. TUGAS : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan rujukan kesehatan masyarakat;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat yang memiliki Jamkesmas • Rasio masyarakat miskin yang memiliki Jamkesda • Rasio masyarakat miskin yang memiliki Jampersal 	• Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Bina Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
2.	terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat MTB	• % jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	• Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Bina Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi • Indeks Pelayanan 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Cangkupan ketersediaan obat-obatan (%) • Prosentase pasien yang terlindungi dari kontaminasi nosokomial. • Prosentase petugas yang terlindungi dari kontaminasi nosokomial. 		Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kusioner Pelayanan Kesehatan 	
3.	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dibidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Perawat, & Dokter yang memiliki kompetensi khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan, Penunjang Medis dan Bina Keperawatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	
4.	Peningkatan Status Rumah Sakit menjadi Tipe C dan yang Ter-Akreditasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Tersedianya Sarana, prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, • Prosentase tersedia jumlah tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Tata Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
10.	Terwujudnya sistem Informasi kesehatan yang terakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Seksi Monitoring, Evaluasi, Rekam Medis Dan Pengendalian Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Laporan Seksi 	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEI SALVESTER TEMMAR